



Pranatan Anyar



Pedagang Pasar Muntilan menerima vaksinasi Covid-19.

KR-Bagyo Harsono

PEDAGANG PASAR MUNTILAN Antusias Ikut Vaksinasi

MAGELANG (KR) - Ratusan pedagang di Pasar Muntilan, Kabupaten Magelang, menerima vaksin Covid-19. Para pedagang tampak antusias mengikuti vaksinasi dosis pertama di basement pasar tersebut. Di pasar ini, ditargetkan sekitar 1.500 pedagang mengikuti vaksinasi.

Selama dua hari, Senin-Selasa (8-9/3), dari sekitar 1.500 pedagang, sudah ada 513 pedagang yang divaksin. Pada Senin sebanyak 240 orang dan Selasa 273 orang. "Vaksinasi dilaksanakan 8-13 Maret 2021, untuk Kamis (11/3) libur," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Magelang Retno Indriastuti, Selasa.

Selanjutnya, kata Retno, vaksinasi dilakukan secara bertahap ke pasar-pasar besar tingkat kecamatan di Kabupaten Magelang. "Untuk jumlah vaksin disesuaikan data usulan dari Disdagkop UKM dan ketersediaan vaksin," ujarnya.

Secara teknis, pelaksanaan vaksinasi dibagi dalam lima meja pelayanan dari Puskesmas dan rumah sakit. "Pelayanan

vaksinasi kami sesuaikan area yang digunakan, dimana di basement Pasar Muntilan sangat terbuka, sehingga perlu sekat saat penyuntikan untuk menjaga privasi penerima vaksin sekaligus persiapan bila ada Kejadian Ikutan Pascaimunisasi (KIPI)," jelasnya.

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang Basirul Hakim mengatakan, untuk pedagang pasar desa, data di bawah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Magelang. "Sedangkan data untuk pedagang pasar yang di bawah Disdagkop UKM sudah kami kirimkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang," imbuhnya.

Seorang pedagang buah, Yupriyati, sukarela untuk divaksin, karena demi kesehatan dan untuk mencegah penyebaran Covid-19. "Setelah divaksin lengan agak pegal, tapi saya lega sudah divaksin. Sebelum divaksin ditanya kondisi kesehatan oleh petugas dan layak untuk divaksin," ujarnya. (Bag)-d

JUMLAH FASKES DAN DATA

Jadi Kendala Vaksinasi Covid-19

JAKARTA (KR) - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mengakui realisasi harian vaksinasi Covid-19 belum sesuai ekspektasi, karena terbatasnya jumlah fasilitas kesehatan (Faskes) dan belum sempurnanya sistem informasi data untuk proses vaksinasi.

"Sejauh ini beberapa kendala Pemerintah adalah terbatasnya jumlah fasilitas kesehatan, belum sempurnanya sistem informasi data untuk vaksinasi dan alur komunikasi untuk masyarakat," kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam telekonferensi pers di Jakarta, Selasa (9/3).

Wiku berjanji pihaknya akan terus mengevaluasi pelaksanaan vaksinasi untuk perbaikan ke depan. "Pemerintah terus mengevaluasi pelaksanaan vaksinasi sebagai input untuk memperbaiki ke depannya," ujar Wiku.

Berdasarkan data Satgas Pena-

nanganan Covid-19, sejak Program Vaksinasi Pemerintah dimulai pada 13 Januari 2021 atau dua bulan lalu, sudah disuntikkan dosis pertama vaksin kepada 3.337.026 orang hingga Selasa kemarin. Sedangkan dosis kedua sudah diberikan kepada 1.197.772 orang.

Di sisi lain, Wiku Adisasmito mengatakan, Pemerintah sedang mencermati isu penemuan sindikat internasional pemalsu vaksin Covid-19. "Program vaksinasi internasional yang berlangsung saat ini diwarnai isu penemuan sindikat pemalsuan vaksin. Pemalsuan vaksin adalah tindak kriminal yang membahayakan

masyarakat, khususnya di tengah pandemi," ujar Wiku.

Pemerintah, kata Wiku, memastikan vaksin Covid-19 yang ada di Indonesia seluruhnya asli karena pengadaannya dilakukan dengan skema Pemerintah dengan Pemerintah atau *Government to Government* (G2G).

Menurutnya, hingga kini belum ditemukan sindikat pemalsuan vaksin di Indonesia, karena seluruh pengadaan vaksin dilakukan dengan skema G2G atau antarpemerintah. Jumlah vaksin juga sangat terbatas, sehingga apabila vaksin diperjualbelikan bebas maka sudah pasti merupakan vaksin palsu.

"Tapi pemerintah tetap memonitor pemalsuan vaksin dan melakukan edukasi serta koordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan keaslian vaksin," katanya. (Ant/Ati)-d

'Long Covid' Dapat Timbulkan Masalah Kesehatan

JAKARTA (KR) - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mengungkapkan, *long covid* dapat menyebabkan masalah kesehatan bagi penyintas Covid-19 berusia muda dan tanpa riwayat komorbid.

"Penderita Covid-19 secara umum akan sembuh 2-6 pekan, tapi untuk beberapa orang beberapa gejala akan dirasakan beberapa pekan setelah dinyatakan pulih. Hal ini juga bisa dialami oleh mereka yang menderita gejala ringan, berusia muda atau anak-anak dan yang tidak punya komorbid," kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito di Graha BNPB Jakarta, Selasa (9/3).

Menurut Wiku, *long covid* adalah

gejala sakit berkepanjangan yang diderita setelah tes Covid-19 menunjukkan hasil negatif. "Pada sampel berusia 18-34 tahun yang sebelumnya sehat, 20 persen atau 1 dari 5 melaporkan menderita beberapa gejala berkepanjangan setelah menderita Covid-19," ungkap Wiku mengutip penelitian WHO.

Namun, menurut Wiku, mereka yang menderita *long covid* tidak akan menularkan Covid-19 kepada mereka yang berada di sekitarnya. "Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Amerika Serikat telah mengamati gejala berkepanjangan yang diderita *long covid*, umumnya adalah kelelahan, kesulitan bernapas, batuk, sakit persendian dan sakit dada,"

tambah Wiku.

Gejala lain yang mungkin ditemui adalah kesulitan berpikir dan berkonsentrasi atau sering disebut *brain fog*, depresi, sakit pada otot, sakit kepala, demam dan jantung berdebar.

"Meski kasusnya jarang ada, juga komplikasi medis yang menyebabkan masalah kesehatan berkepanjangan di beberapa penyintas Covid-19," kata Wiku.

Masalah-masalah tersebut mempengaruhi sistem organ tubuh yang berbeda, antara lain terjadi pembengkakan otot jantung, masalah fungsi pada paru-paru, kerusakan ginjal akut, gatal-gatal dan rambut rontok serta masalah pada indra penciuman dan perasa. (Ant)-d

WANITA PENGUSAHA DI TENGAH TEKANAN PANDEMI

GKR Hemas: Harus Pintar Cari Celah

YOGYA (KR) - Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) DIY, GKR Hemas mengemukakan, dunia usaha sangat merasakan dampak pandemi Covid-19 berupa menurunnya eksistensi usaha. Kondisi ini menyebabkan produksi dan pemasaran produk menjadi sangat menurun.

Namun demikian para pelaku usaha tidak boleh menyerah, harus bisa kreatif dalam mencari celah usaha berupa inovasi dan diversifikasi produk sesuai kebutuhan masyarakat saat ini dan menggunakan teknologi informasi dalam memasarkan usahanya.

"Kita harus yakin bahwa dalam kesulitan pasti ada kemudahan," ujar GKR Hemas, saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) DIY, Selasa (9/3). Rakerda diselenggarakan secara luring terbatas di Gedung Sekretariat DPR RI Yogyakarta dan daring, mengangkat

tema 'Iwapi Berperan dalam Meningkatkan Produktivitas dan Inovasi yang Mendukung Daya Tahan Ekonomi di Era Kebiasaan Baru'. Siaran tunda secara daring, dapat disaksikan di Channel Youtube Kedaulatan Rakyat.

GKR Hemas yang juga anggota DPD RI yakin, Iwapi DIY sebagai wadah pembinaan pelaku usaha yang digerakkan oleh kaum wanita, akan mampu melakukan terobosan. Sehingga para anggota Iwapi DIY akan dapat terus bertahan serta berkembang dalam kondisi yang sulit.

Ketua Umum DPP Iwapi Ir Nita Yudi MBA menilai,



GKR Hemas



Ir Nita Yudi MBA



Susi Ambarwati SH

wanita pengusaha harus mampu menyesuaikan diri terhadap kondisi pandemi Covid-19, sekaligus melakukan inovasi untuk bisa bangkit. "Kita harus optimis bisa bangkit," ujar Nita Yudi.

Diakui, wanita pengusaha yang menjadi anggota, 98 persen bergerak di sektor UMKM. Karena itu, kolaborasi antarpengusaha dan pemerintah sangat penting untuk dapat menuju kebangkitan. Termasuk di antaranya mampu memanfaatkan stimulus yang diberikan pemerintah kepada para peng-

usaha. Dalam kesempatan itu, Nita juga mengungkapkan, saat ini banyak pasar digital yang digelar oleh BUMN, sehingga menjadi peluang bagi peningkatan transaksi.

Ketua Umum Iwapi DIY, Susi Ambarwati SH mengatakan, dalam kondisi pandemi saat ini, diperlukan program kerja serta kemitraan yang strategis. Yakni dengan menjalin kemitraan dengan dinas, instansi, perusahaan nasional (BUMN) dan swasta yang dapat bersinergi dalam peningkatan kese-

jahteraan ekonomi bagi perempuan. "Beberapa program sudah terlaksana, kemitraan dengan BUMN salah satu contohnya kita sering menerima pesanan makanan, seragam dari mereka (BUMN) dan masih banyak lagi," katanya.

Ikut memberikan sambutan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Aris Riyanta. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM DIY, Ir Sri Nurkayatsiwi dan Wakil Ketua Komisi B DPRD DIY, RB Dwi Wahyu B SPD MSI. (Dev)-d

MUHAMMADIYAH MINTA KEMENDIKBUD PERBAIKI

Peta Jalan Pendidikan 'Tidak Sejalan' Konstitusi

YOGYA (KR) - Hilangnya frasa 'agama' dalam Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 perlu dipertanyakan. Hal ini dinilai Haedar Nashir akan membawa dampak besar terhadap aplikasi maupun ragam produk kebijakan di lapangan. Karena peta ini bisa disebut etidak sejalan dengan konstitusi khususnya pasal 31. Untuk itu Kemendikbud perlu memperbaiki draf dengan mendengar masukan pelbagai pihak.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengemukakan hal tersebut kepada media usai pencaangan vaksinasi Covid-19 di Kantor PP Muhammadiyah Jl Cik Ditiro, Selasa (9/3). Jika merujuk pedoman kewajiban pada Peta Jalan Pendidikan Nasional yaitu Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 serta poin pertama UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menyatakan secara eksplisit bahwa agama merupakan unsur integral dalam pendidikan nasional.

"Dalam diskusi beberapa waktu lalu, Muhammadiyah mengusulkan tegas dan seksama agar frasa agama, masuk. Ini bukan pemikiran primordial, dogmatis dan eksklusif. Sebab berbicara agama sebagai sumber pendidikan itu sesuai Konstitusi," jelasnya. Dan ini, lanjutnya, berlaku untuk semua agama yang hidup dan berkali di Indonesia. Dengan demikian tidak eksklusif dan tidak primordial. Sebab sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga ada UUD '45 dengan pasal 29. Apalagi turunan kebijakan ketentuan hukumnya tidak boleh peraturan di atasnya yaitu: Peraturan Pemerintah, UU Sisdiknas, UUD 1945 dan puncaknya Pancasila. (Fsy)-f

ASN DILARANG KE LUAR DAERAH Pemda DIY Siapkan Sanksi

YOGYA (KR) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjoe Kumolo mengeluarkan Surat Edaran larangan atau pembatasan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke luar kota/daerah saat liburan Isra' Mi'raj dan Nyepi tahun ini.

Aturan tersebut tertuang dalam SE Menteri PAN-RB No 6 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah Bagi Pegawai ASN Selama Hari Isra' Mi'raj dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943 dalam Masa Pandemi Covid-19. Larangan bepergian ke luar daerah bagi ASN ini sebagai antisipasi melonjaknya kasus positif Covid-19 pada hari libur nasional.

"Kami siap untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri PAN-RB tersebut. Jadi seandainya ditemukan ada ASN yang terbukti melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku," kata Sekda DIY Drs Kadamanta Baskara Aji di Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (9/3).

Baskara Aji mengungkapkan, begitu ada SE dari Menteri PAN-RB, pihaknya langsung menindaklanjuti dan melakukan sosialisasi kepada ASN di lingkungan Pemda DIY, agar para ASN di DIY bisa melaksanakan kebijakan itu sebaik-baiknya, sesuai ketentuan. (Ria/Ati)-f

JIKA DIANGGAP PELANGGARAN HAM BERAT Mahfud Minta Bukti Kasus 6 Laskar FPI

JAKARTA (KR) - Menko Polhukam Mahfud MD meminta Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) enam laskar FPI agar menunjukkan bukti insiden tewasnya enam anggota FPI tersebut merupakan pelanggaran HAM berat. Saat bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Selasa (9/3), tujuh anggota TP3 menyampaikan keyakinannya, insiden ini termasuk dalam kasus pelanggaran HAM berat dan meminta agar dibawa ke pengadilan HAM.

Di antara anggota TP3 yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, yakni Amien Rais, Abdullah Hehamahua, Marwan Batubara dan Kiai Muhyiddin. Sementara, Presiden Jokowi didampingi Mensesneg Pratikno dan Menko Polhukam Mahfud MD. "Tujuh orang yang diwakili Pak Amien Rais dan Pak Marwan Batubara tadi menyatakan mereka menyatakan keyakinan telah terjadi pembunuhan terhadap enam laskar FPI dan mereka meminta agar ini dibawa ke pengadilan HAM kare-

na pelanggaran HAM berat. Itu yang disampaikan kepada Presiden," kata Mahfud saat konferensi pers di Kantor Presiden.

Menanggapi hal itu, Presiden pun menyampaikan telah meminta Komnas HAM agar bekerja secara independen. Presiden juga menegaskan, pemerintah tidak ikut campur dalam penyelidikan kasus itu. Komnas HAM sendiri telah menyampaikan laporannya serta empat rekomendasi kepada Presiden.

"Yaitu, temuan Komnas HAM, yang terjadi di Tol Cikampek KM 50 itu adalah pelanggaran HAM biasa," ujar Mahfud.

Mahfud pun menegaskan, pemerintah bersikap terbuka terkait kasus ini. Dengan begitu, jika memang terdapat bukti adanya pelanggaran HAM berat, agar disampaikan kepada Presiden. "Bukti, bukan keyakinan. Karena kalau keyakinan, kita juga punya keyakinan sendiri-sendiri bahwa peristiwa itu dalangnya si A, si B, si C," katanya menambahkan. (Sim)-d

BKKBN Data Keluarga 2021

JAKARTA (KR) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan menyelenggarakan Pendataan Keluarga 2021 untuk memotret kondisi keluarga Indonesia saat ini demi membangun keluarga yang berkualitas.

"Kalau kita ingin mengurai suatu permasalahan itu alangkah baiknya kalau permasalahan itu dirunut sampai ke tingkat keluarga atau analisis akar penyebab masalah di tingkat keluarga," kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo di Jakarta, Selasa (9/3)

Hal itu, ujar Hasto, menggarisbawahi pentingnya Pendataan Keluarga untuk memotret kondisi keluarga dan menjadi alasan BKKBN melakukannya sesuai dengan tujuan untuk membangun keluarga berkualitas.

Dia menegaskan bahwa BKKBN tidak akan bisa memperbaiki keluarga Indonesia menjadi lebih berkualitas jika tidak mengetahui potret keluarga saat ini. Pendataan Keluarga 2021 rencananya dilaksanakan pada 1 April sampai dengan 31 Mei 2021 dan dilakukan oleh kader petugas pendata BKKBN yang sudah terlatih serta penyuluh Keluarga Berencana di seluruh Indonesia.

Para petugas akan mengumpulkan data terkait dengan kependudukan, data Keluarga Berencana dan data tentang pembangunan keluarga. (Ati)-d